

# **TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KAB. NGAWI TAHUN 2015 – 2019**

**Sutrisno**

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
STISOSPOL WASKITA DHARMA MALANG

Email: [sutrisno1957.waskita@gmail.com](mailto:sutrisno1957.waskita@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Perkembangan era Otonomi Daerah seperti sekarang ini, prinsip good governance menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar – tawar lagi keberadaannya dan mutlak harus terpenuhi. Dua variabel terpenting dari good governance adalah transparansi dan akuntabilitas dalam tingkat kebijakan dan administrasi anggaran. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan dan kemandirian keuangan daerah, serta efektifitas pendapatan asli daerah di Kabupaten Ngawi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan periode yang dianalisis dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Data diperoleh dari DPPKA Kabupaten Ngawi dan Bapedda Kabupaten Ngawi, alat analisis yang digunakan adalah analisis kemampuan dan kemandirian keuangan daerah, serta analisis efektifitas. Hasil penelitian ini memberikan gambaran kemampuan keuangan daerah kurang dari 10 % atau rata – rata sekitar 3,9 %. Berarti selama otonomi daerah di Kabupaten Ngawi sangat kurang mampu dan masih tergantung pada bantuan dana dari pusat. Kemandirian keuangan daerah rata – rata 3,51. Berarti selama otonomi daerah di Kabupaten Ngawi sangat kurang mandiri dan masih tergantung pada bantuan dana dari pusat. Rata-rata efektifitas pendapatan asli daerah 6 tahun terakhir tahun 2015 - 2019 adalah sebesar 110,03 % yang berarti bahwa realisasi pendapatan asli daerah rata-rata lebih besar 10,03 % dari target yang telah direncanakan. Efektifitas pendapatan asli daerah sangat baik menjadi batu loncatan yang penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut, namun perlu dicermati untuk tahun 2018 dan tahun 2019 realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Ngawi yang tidak bisa memenuhi target. Hal ini disebabkan karena kurang cermatnya beberapa satuan kerja pemerintah daerah dalam menentukan target, potensi, dan strategi dalam pengalihan pendapatan asli daerah.

**Kata kunci; Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah, Efektifitas PAD**

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia mulai 1 Januari 2001 yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang “Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004, menghendaki daerah untuk berkreasi mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan”.

Otonomi daerah bertujuan “untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Sesuai asas *money follows function*, penyerahan kewenangan daerah juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat”. Hal tersebut dimaksudkan agar Daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusan pemerintahannya sendiri karena sumber-sumber pembiayaan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Apabila mekanisme tersebut sudah terwujud maka cita-cita kemandirian Daerah dapat direalisasikan.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan “kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah” (Halim, 2007). Kemandirian keuangan daerah ini merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Diadakannya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Begitu pula dengan keuangan daerah tersebut, dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mencapai suatu kemandirian keuangan daerah.

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh tiap Pemkab/Pemkot. Semakin besar PAD dibandingkan dengan bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat maka Pemkab/Pemko tersebut dapat dikatakan mandiri (Muliana, 2008). PAD itu sendiri “merupakan hal yang utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dilihat efektivitas PAD tersebut dengan membandingkan antara PAD yang dianggarkan dengan realisasi PAD”.

PAD inilah yang merupakan sumber pembiayaan yang memang benar-benar diambil dari daerah itu sendiri sehingga dapat menggambarkan kondisi administrasi riil daerah. Ruang lingkup penelitian ini pada tingkat Kabupaten (studi kasus pada Kabupaten Ngawi) menunjukkan Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom. Sedangkan pengamatan dipakai periode 2006 – 2010 yang merupakan periode masa kerja Bupati/Wakil Bupati Ngawi yang dipilih langsung masyarakat Ngawi untuk tahap kedua.

Otonomi daerah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan daerah. Ukuran analisis kemandirian keuangan daerah merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan dan manfaat penganggaran (APBD). Nilai variabel

kemandirian keuangan daerah akan menentukan tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja APBD. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan mengkaji mengenai besaran tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Ngawi selama kurun waktu tahun 2007 – 2011, trend kemandirian keuangan daerah Kabupaten Ngawi selama kurun waktu tahun 2007 – 2011, dan upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Ngawi.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang memberikan deskripsi tentang tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Menurut Usman & Akbar (2004:4) “penelitian deskriptif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu”.

Dengan kata lain penelitian ini ‘bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini lebih mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*) dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri” (Usman & Akbar 2004 : 81).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kemampuan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis kemampuan keuangan daerah pada tahun 2016 sampai tahun 2019 kurang dari 10 % atau rata – rata sekitar 3,39 %. Berarti selama terjadi otonomi daerah di Kabupaten Ngawi belum optimal. Hal tersebut dapat dijelaskan karena daerah belum siap dengan adanya implementasi kebijakan otonomi daerah. Selain itu, daerah belum menggali sumber-sumber keuangan daerah yang ada secara optimal, sehingga daerah dan masyarakat masih bergantung pada pemerintah pusat. Pola kecenderungan menurun karena pertumbuhan pendapatan asli daerah tidak berbanding lurus dengan total pendapatan daerah, untuk informasi lebih terperinci dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Nilai Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten Ngawi

No	Tahun	PAD	TPD	KPKD
		Nilai	Nilai	%
1	2016	13.402.502.253,82	367.536.151.254,82	3,65
2	2006	20.248.384.420,48	547.960.209.812,88	3,70
3	2007	20.735.830.465,98	610.883.125.455,98	3,39
4	2008	23.670.907.767,01	717.094.445.315,01	3,30
5	2009	25.574.548.123,83	797.425.759.150,83	3,21

6	2019	27.489.942.064,49	887.001.554.928,49	3,10
Rata-Rata				3,39

**Sumber : DPPKA Kabupaten**

Keterangan :

KPKD : Kemamampuan Keuangan Daerah.

PAD : Pendapatan Asli Daerah.

TPD : Total Pendapatan Daerah.

### Analisis Efektifitas

Tingkat efektivitas pendapatan asli daerah di Kabupaten Ngawi dihitung dengan rumus (Insukindro, dkk;1994:22). Apabila perhitungan efektivitas pajak tersebut menghasilkan angka 100 % atau lebih, maka pendapatan asli daerah semakin efektif, dengan kata lain kinerja pemungutan pendapatan asli daerah tersebut di Kabupaten Ngawi semakin baik. Hasil analisis berdasarkan data target dan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2016 sampai dengan 2019 adalah seperti terinci pada tabel 4.8 di bawah ini:

**Tabel 1.2 Hasil Efektifitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi**

No	Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Efektifitas
		Nilai	Nilai	%
1	2016	12.974.960.967,79	13.402.502.253,82	103,30
2	2006	16.097.673.751,00	20.248.384.420,48	125,78
3	2007	21.106.223.831,48	20.735.830.465,98	98,25
4	2008	18.422.259.666,51	23.670.907.767,01	128,49
5	2009	22.837.442.813,08	25.574.548.123,83	111,99
6	2019	29.759.512.850,00	27.489.942.064,49	92,37
Rata-Rata				110,03

**Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi (diolah)**

Dilihat dari tabel 5.10 rata-rata efektifitas pendapatan asli daerah 6 tahun terakhir tahun 2016 - 2019 adalah sebesar 110,03 % yang berarti bahwa realisasi pendapatan asli daerah rata-rata lebih besar 10,03 % dari target yang telah direncanakan dan pola kecenderungan tidak stabil (naik turun) bisa dilihat Gambar 5.4. Efektifitas pendapatan asli daerah sangat baik menjadi batu loncatan yang penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut, Namun perlu dicermati untuk tahun 2007 Itu disebabkan karena kurang cermatnya beberapa satuan kerja pemerintah daerah dalam menentukan target, potensi, dan strategi dalam pengalihan pendapatan asli daerah terutama pada pendapatan redistribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah yang tidak

memenuhi target (lihat pada lampiran 3), begitu pula pada tahun 2019 realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Ngawi yang tidak bisa memenuhi target terutama pada pendapatan redistribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang tidak memenuhi target (lihat pada lampiran 6).

Pada tahun 2006 nilai efektifitas yang tinggi dikarenakan pendapatan asli daerah dari lain-lain PAD yang sah yang melebihi target hampir tiga kali lipat (lihat pada lampiran 2), sedangkan pada tahun 2008 juga terjadi nilai efektifitas yang tinggi dikarenakan target pada pendapatan redistribusi daerah yang diturunkan dari target tahun 2007 ternyata bisa melebihi dari realisasi tahun 2007, selain itu lain-lain PAD yang sah juga melebihi target hampir dua kali lipat (lihat pada lampiran 4), Hasil analisis data sesuai dengan hipotesis yang menyatakan efektivitas pendapatan asli daerah di Kabupaten Ngawi rata-rata lebih besar dari 100 % (sangat efektif).

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode pooled least square menggunakan pendekatan fixed effect dan mengacu pada pembahasan yang telah dipaparkan pada bab V melalui beberapa variabel yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah, pajak, belanja modal, pendapatan perkapita, jumlah penduduk, dan sumber daya alam, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak (PJK) berpengaruh positif dan signifikan, hal ini berarti semakin tinggi pendapatan dari pajak maka tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Ngawi di Provinsi Jawa Timur akan meningkat. Belanja modal (BM) memberikan pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Ngawi di Provinsi Jawa Timur. Besarnya belanja modal yang digunakan akan mengurangi tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Ngawi di Provinsi Jawa Timur. Pendapatan perkapita (PP) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Ngawi di Provinsi Jawa Timur, sehingga kenaikan pendapatan perkapita dapat tingkat kemandirian keuangan daerah.
2. Jumlah penduduk (JP) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Ngawi di Provinsi Jawa Timur. Banyaknya jumlah penduduk akan menaikkan tingkat kemandirian keuangan daerah.
3. Sumber daya alam (SDA) atau distribusi sektor pertanian dan pertambangan pada PDRB Kabupaten Ngawi di Provinsi Jawa tidak berpengaruh signifikan, hal ini berarti sumber daya alam tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Ngawi di Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan semua variabel memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Ngawi di Provinsi Jawa Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A. Karim. 2007. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, Zainal Abidin. 2001. *Membangun Negara Islam*. Yogyakarta: Pustaka Iqra.
- Anthony, Robert N. dan Govindarajan, Vijay. 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ariani, K. R. 2010. "Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tax Effort (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Surakarta)". *Jurnal Akuntansi*, 1(2) Universitas Sebelas Maret : Surakarta.
- Arsyad. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YPKN.
- Asmara, J. A. 2010. Analisis Perubahan Alokasi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darusalam. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Vol. 3 No. 2*.
- Brotodihardjo, Santoso. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Boediono. 2002. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPEE.
- Cohen, Sandra. 2006. Identifying The Moderator Factors Of Financial Performance In Greek Municipal. *Fifth Annual Conference. HFFA. Thessaoica*.
- Darmanto, Habib Candra. 2012. *Pengaruh Population, Employment, Size Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Darwis, E, T, R. 2015. Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Artikel Ilmiah. Universitas Negeri Padang.
- Fadly Nggilu, Harijanto Sabijono, dan Victorina Tirayoh. 2016. Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol.16 No. 04*.

- Firmansyah, Iman. 2017. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 – 2015*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Fitriyah, Sayyidadul. 2017. Politik Anggaran Pemerintah Daerah Perspektif Maqasid Syariah: Studi Analisis Sektorial Pada Apbd Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2015. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan Vol. 4 No. 10 Hal. 787-801*.
- Groves, Sanford M, S. Godsey, dan Shulman. 2001. Financial Indicator for Local Government. *Public Finance International City Management Association Vol. 9 Hal. 243-255*.
- Habibi, Ahmad. 2012. Trade Off Kerusakan Sumber Daya Alam Dan Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Asas Hukum Dan Ekonomi Islam Vol. 4 No. 1*.
- Halim, A. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul Jamal Abdul Nasir. 2007. “Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang”, *Jurnal Manajemen Usahawan*, Nomor 06, hal. 42.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Huda, Nurul. 2008. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Imawan, Riswanda dan Wahyudin, Agus. 2014. Analisis kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2010-2012. *Accounting Analysis Journal Vol. 3 No. 2 Hal. 147-155*.
- Kaunang, C, E., Naukoko, A, T., & Londa, A, T. 2016. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Pada Kota Manado (Tahun 2010-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol 16 (02).
- Khusaini, Muhamad. 2006. *Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Malang: BPFE Unbraw.

- Lubis, Deni. 2013. Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Dengan Pendekatan Ad-Daruriyyat Al-Khams/Maqasid As-Syariah: Studi Kasus APBD Kabupaten Bogor Tahun 2011. *Jurnal al-Muzara'ah* Vol. 1 No. 2 Hal. 119-138.
- Mahardika, I Gusti Ngurah Suryaadi. 2014. *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marizka, R. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota Di Sumatera Barat. Skripsi Tidak Diterbitkan. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Martono, Nanang. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mukarramah, Habibatul. 2017. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Lima Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2014*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Muliana. 2009. Pengaruh Rasio Efektivitas PAD, DAU, dan DAK Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Skripsi Tidak Diterbitkan. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Nachrowi dan Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nursetianingrum, Feni. 2018. *Pengaruh Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, Dan Dana Alokasi Bantuan Pembangunan Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2012-2016*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.
- Oates, W. 1993. Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal* Vol.16 237-243.

Patriati, Ratri. 2016. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 53

Ra'ana, Irfan Mahmud. 1990. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, Yogyakarta: Pustaka Firdaus.

Rustiadi, Ernan. Hakim, Sunsun S. Panuju, Dyah R. 2009. *Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Crestpent Press.

Sari, P, I. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Diy Periode 2007-2014). Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta. ISBN 978-602-73690-3-0.

Sasana, Hadi. 2006. Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Pembangunan Vol. 3 No. 2 Hal. 145-170*.

Simanjuntak, Timbul H. And Mukhlis, Imam. 2015. Empirical Study About The Interaction Between Equalization Funds, Regional Finance, And Human Development Index In Regional Economic. *International Journal Of Economics And Finance, Vol. 7 No. 1*.

Siregar, Baldric Dan Pratiwi, Nurna. 2017. The Effect Of Local Government Characteristic And Financial Independence On Economic Growth And Human Development Index In Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan Vol. 19 No. 2 Hal. 65-71*.

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Suhada, Bambang dan Setyawan, Dharma. 2016. *The Narrative of Islam and Green Economics in Utilization of Natural Resources*. Jurnal Kontekstualita, Vol. 31, No.1, Hal. 21-36

Sukirno, Sadono. 2008. Pengantar Teori Makroekonomi. Edisi Ketiga. PT. Grafindo Persada. Jakarta.

Sunarti, Euis. 2006. *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya*, Skripsi Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor.

Suparmoko. 1997. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta: BPFE.

Surahman, Maman Dan Ilahi, Fadilah. 2017. Konsep Pajak Dalam Hukum

Islam. *Jurnal Amwaluna Vol. 1 No. 2.*

Susanto, Eliza Dewi dan Henny Murtini. 2015. Karakteristik Pemerintah Daerah Pendorong Kemandirian Keuangan Daerah di Jawa Tengah. *Accounting Analysis Journal. Universitas Negeri Semarang Vol. 4 No. 4.*

Syafrudin, Ateng. 1991. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Pembangunannya.* Jakarta: Rineka Cipta.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2007. *Manajemen Publik,* Jakarta: Geasindo Kedua. Literatur Lintas Media.

Taryoko. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2006-2013.* Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. 2004. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2003. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2004. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial,* Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Pusat dan Pemerintah Daerah. 2004. Jakarta.

Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya.* Jakarta: Ekonosia.

Winarna, Jaka. 2010. Analisis kinerja keuangan pemerintah di Jawa Tengah. *Journal of Rural and Development Vol. 1 No. 2.*

\_\_\_\_\_. 2019. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) [www.djpk.kemenkeu.co.id](http://www.djpk.kemenkeu.co.id)  
[www.jatimprov.go.id](http://www.jatimprov.go.id), (Online), diakses tanggal 21 Mei 2021.